

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Standar Biaya

Standar biaya berperan dalam penghitungan biaya (*costing*) dengan mengaitkan pada efisiensi dan pengukuran kinerja (Kusuma, Pambudi, & Suprayitno, 2019). Standar biaya merupakan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) baik berupa standar biaya keluaran maupun standar biaya masukan, yang digunakan sebagai tolak ukur dalam perhitungan kebutuhan anggaran penyusunan Kertas Kerja RKA-KL (Kementerian Keuangan, 2013). Standar biaya berupa satuan yang ditetapkan terdiri dari standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran (Kusuma & Suprayitno, 2019). Standar biaya merupakan salah satu komponen dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja yang bertugas menentukan biaya produksi melalui pengembangan standar struktur biaya dan sebagai acuan kegiatan/*output* yang memiliki karakteristik serupa.

Dalam sudut pandang akuntansi biaya, standar biaya adalah biaya yang ditentukan dimuka (didepan) yang mana merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dalam asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu (Mulyadi, 1992). Biaya standar mendasarkan pada konsep pengeluaran biaya waktu yang lalu untuk diambil rata-rata dengan cara dibuat penyesuaian dengan mempertimbangkan

taksiran unsur biaya yang akan datang. Standar normal tidak menitik beratkan pada pengukuran-pengukuran dan pengambilan keputusan dalam waktu yang relatif panjang. Sehingga dasar ini dapat dibuat suatu rencana yang bisa memicu kinerja dari para pegawai. Dapat kita simpulkan bahwa standar biaya merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengelolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Sistem akuntansi biaya mencatat biaya yang seharusnya dikeluarkan dan biaya yang sesungguhnya terjadi sehingga dapat menyajikan perbandingan biaya standar dan biaya sesungguhnya serta menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar.

Menurut Carter dan Usry (2005), biaya standar merupakan biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu periode waktu. Biaya standar adalah biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi sekarang atau yang diantisipasi. Biaya yang seharusnya dikeluarkan mengandung arti bahwa biaya merupakan pedoman dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Jika biaya sesungguhnya menyimpang dari biaya standar, maka yang dianggap benar adalah biaya standar sepanjang asumsi-asumsi yang mendasari penentuannya tidak berubah. Sedangkan menurut Mather dan Deaking (1997), yang dimaksud biaya standar adalah biaya yang diantisipasi untuk memproduksi atau menjual satu unit keluaran, sehingga biaya yang ditentukan terlebih dahulu adalah barang yang akan diproduksi. Dari definisi pada ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya standar merupakan biaya yang seharusnya terjadi di masa yang akan datang untuk membuat

suatu produk yang ditentukan terlebih dahulu dalam asumsi kondisi ekonomi tertentu.

Kegunaan standar biaya menurut Mulyadi (1992), biaya standar merupakan alat penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, maka akan memicu pelaksanaan pekerjaan secara efektif, karena pelaksana telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan, dan pada tingkat berapa biaya pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan. Sistem biaya standar akan memberikan pedoman kepada manajemen mengenai berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan lain. Menurut Carter dan Usry (2005), biaya standar membantu perencanaan dan pengendalian operasional. Biaya standar memberikan wawasan mengenai dampak-dampak yang mungkin dari keputusan atas biaya dan laba.

Kelemahan biaya standar menurut Mulyadi (1992) yaitu tingkat ketaatan dan kelonggaran standar tidak mudah dihitung dengan tepat. Meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh organisasi, tetapi tidak menjamin bahwa standar biaya telah diterapkan secara keseluruhan dengan tingkat ketaatan dan kelonggaran yang relatif sama. Sering kali standar biaya cenderung menjadi kaku atau tidak fleksibel dalam jangka waktu pendek. Keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan, perubahan standar menimbulkan masalah di persediaan. Namun, jika standar biaya sering diperbaiki maka menyebabkan kurang efektifnya standar biaya

sebagai alat pengukur pelaksana. Tetapi jika tidak diadakan perbaikan standar, padahal telah terjadi perubahan yang berarti dalam produksi, maka akan terjadi pengukuran pelaksanaan yang tidak tepat dan tidak realistis.

Standar biaya masukan (SBM) merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-KL (Kementerian Keuangan, 2013). Standar biaya masukan merupakan batas dan perkiraan tertinggi dalam penyusunan RKA-KL. SBM diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Persetujuan Menteri Keuangan. SBM diatur sebagai batas tertinggi biaya untuk menghasilkan *output* dan sebagai alat *review baseline* atas komponen *input* dari *output* tahun sebelumnya terhadap tahun direncanakan. Standar biaya ini selain merupakan sarana untuk meningkatkan efisiensi bagi K/L dalam transmisi biaya, juga harus bisa dilaksanakan secara efektif sesuai rencana kerja yang telah disusun (Mahfudin, 2021). SBM juga sebagai estimasi yang dimana besaran SBM hanya dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku. Secara garis besar, jenis SBM yang telah diatur menjadi SBM honorarium, SBM barang dan pemeliharaan, dan SBM perjalanan dinas.

Standar Biaya Masukan merupakan unsur penting dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK). Standar biaya keluaran berperan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran, sejalan dengan itu maka kebijakan SBK difungsikan sebagai tulang punggung penerapan penganggaran berbasis kinerja (Kusuma & Suprayitno, 2019). Standar biaya keluaran terdiri atas standar biaya keluaran umum yang merupakan standar biaya yang berlaku untuk beberapa K/L, dan standar biaya keluaran khusus yang merupakan standar biaya keluaran yang berlaku untuk satu

K/L. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian dalam penggunaan standar biaya masukan dalam penyusunan SBK. Dalam penelitian ini diharapkan adanya standar biaya khusus yang mengatur tentang biaya pelatihan tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Konsep dasar dalam penelitian ini adalah standar biaya, yang mengacu pada estimasi biaya yang ditetapkan untuk pelatihan tenaga konstruksi. Teori keuangan dan akuntansi dapat digunakan untuk menjelaskan konsep standar biaya, termasuk pengelolaan dana, perencanaan anggaran, dan pengendalian biaya.

2.2 Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan suatu ilmu dan salah satu cabang dari ilmu manajemen. Menurut Sumardi dan Suharyono (2020), manajemen keuangan dapat diartikan sebagai merencanakan, mencari dan mengarahkan segala dana untuk memaksimalkan efisiensi. Mempelajari manajemen keuangan dapat menjelaskan tentang beberapa keputusan yang perlu diambil seperti keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan untuk memenuhi kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen (Musthafa, 2017). Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan segala aktivitas organisasi/lembaga yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan tentang bagaimana memperoleh pendanaan dan penyimpanan dana atau aset yang dimiliki organisasi/lembaga agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi (Ansory dan Indrasari, 2018).

Namun menurut Supomo dan Nuruhayati (2019) manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan manajemen yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, evaluasi, dan pemberian penghargaan terhadap anggota organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan penggunaan personel untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif di suatu organisasi (Sudaryo et al., 2018). Dalam melakukan pengembangan khususnya melalui kegiatan pelatihan tentunya memerlukan sumber daya keuangan. Dengan demikian manajemen keuangan dalam pelatihan merupakan suatu proses mengatur sumber daya berupa keuangan guna tercapainya tujuan pengembangan SDM dengan pelatihan agar menghasilkan *output* yang maksimal secara efektif dan efisien. Teori manajemen keuangan, terutama yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, pengukuran kinerja finansial, dan perencanaan anggaran, dapat digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek keuangan dalam penerapan standar biaya dalam pelatihan.

2.3 Manajemen Pelatihan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia terutama diusia produktif maka dapat kita kenal dengan istilah bonus demografi. Dari sisi sumber daya manusia, pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini berada pada fase produktif. Ketersediaan tenaga dan lapangan kerja dapat membantu mempercepat pembangunan dan kemajuan negara, namun demikian pemerintah harus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika melihat dari data BPS (2020) kita melihat bonus demografi Indonesia masih belum dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam negeri (Umar, 2017). Perlu

adanya pengembangan tenaga kerja tersebut dengan suatu pelatihan yang membuat akan meningkatnya kualitas sehingga bermanfaat bagi pembangunan negara.

Teori manajemen pelatihan dapat digunakan untuk memahami aspek pengelolaan program pelatihan, termasuk tahapan perencanaan dan tahapan evaluasi. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana standar biaya dapat diintegrasikan dalam proses manajemen pelatihan. Pelatihan mengacu pada keinginan untuk meningkatkan diri dan mempertahankan eksistensi organisasi (Mawardi et al, 2021). Pelatihan melibatkan banyak latihan untuk mendapatkan kesan atau pengalaman ilmu pengetahuan yang nyata. Pelatihan menyadarkan masyarakat akan penerapan dari ilmu pengetahuan sehingga masyarakat menjadi lebih yakin dan percaya diri terhadap ilmunya. Dalam teori manajemen, pelatihan digolongkan sebagai pengembangan. Pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja teknis. Menambah pengetahuan berarti meningkatnya ketrampilan kerja dan cara mengatasi risiko kerja, sedangkan ketrampilan kerja merupakan keahlian teknis. Menurut Mondy (2008) pelatihan adalah suatu program yang hanya dapat dilaksanakan atas dukungan organisasi sehingga kesadaran organisasi menciptakan dukungan terhadap pekerjaan, antara lain melalui pemberian pelatihan, pendidikan, dan peluang kerja sama. Dalam manajemen pelatihan ini perlu adanya proses pengelolaan suatu *input* (sumber daya) untuk menghasilkan *output* yang dalam hal ini adalah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi.

2.4 Teori Efisiensi

Dilihat dari teori ekonomi, efisiensi mempunyai dua pengertian, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Pengukuran efisiensi teknis biasanya terbatas

pada hubungan teknis dan tenaga kerja dalam proses mengubah *input* menjadi *output*. Oleh karena itu, kebijakan mikro yang bersifat internal dengan control optimal dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi teknis. Efisiensi ekonomis memiliki perspektif makro yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan efisiensi teknis yang mempunyai perspektif mikro. Dalam efisiensi ekonomis harga tidak bisa dianggap sebagai pemberian, karena harga dapat dipengaruhi oleh kebijakan makro (Walter, 1995).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pasal 15 menyebutkan bahwa prinsip belanja berkualitas meliputi efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini berfokus pada prinsip efisiensi dan efektivitas, yang mana definisi efisiensi pada peraturan ini adalah memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait standar biaya. Kemudian definisi efektivitas adalah memperhatikan ketepatan dan relevansi antara keluaran yang dihasilkan dengan sasaran program dan sasaran strategis. Selanjutnya pada pasal 47 yang mengatur tentang standar biaya, yang mana pada intinya adalah Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan, kebenaran formil dan materiil standar biaya. Sehingga dalam menyusun RKAKL maka baik PA maupun KPA harus memedomani dan menggunakan unsur standar biaya. Kemudian SBK disusun dengan menghitung biaya yang dibutuhkan dari seluruh tahapan dalam proses pencapaian keluaran. Keluaran yang dimaksud merupakan kegiatan keluaran yang sifatnya berulang.

Menurut Hadad *et al.* (2003) efisiensi merupakan parameter kinerja yang secara teoritis adalah salah satu hasil kinerja yang mendasari kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Sistem pasar persaingan sempurna menjadi titik tolak berkembangnya teori efisiensi, dimana pasar dengan tangan tidak tak kasat mata (*invisible hand*) akan selalu mengalokasikan sumber daya secara efisien kepada para pelaku ekonomi yang beroperasi di pasar persaingan sempurna (Suryanto dan Susanti, 2020).

2.5 Teori Perencanaan Anggaran

Perencanaan merupakan langkah awal dari arah suatu kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Menurut Tjokoamidjojo (dalam Syafalevi, 2011) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinyu meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat dari rencana itu adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan (Listyaningsih, 2014). Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perencanaan adalah suatu cara tentang bagaimana mencapai tujuan yang sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada agar lebih efektif dan efisien. Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman untuk menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam penelitian ini perlu adanya perencanaan yang tepat guna mencapai target tenaga kerja konstruksi yang berkompeten dengan mengoptimalkan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

Anggaran merupakan rencana tertulis atas kegiatan suatu organisasi, yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dalam satuan moneter untuk periode waktu tertentu (Raharjo dan Sulaeman, 2019). Kemudian Supriyono (2020) berpendapat bahwa penganggaran adalah perencanaan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan atau pengendalian keuangan untuk periode yang akan datang. Halim dan Kusufi (2017) menyatakan bahwa anggaran adalah suatu dokumen yang berisi perkiraan pekerjaan baik berupa pendapatan maupun pengeluaran, disajikan dalam bentuk keuangan yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu dan memuat data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi kinerja. Menurut Sasongko dan Parulian (2018) tujuan penganggaran antara lain: 1) Perencanaan anggaran memberikan arah pada tujuan dan kebijakan organisasi; 2) Koordinasi anggaran dapat memudahkan koordinasi antar departemen di dalam organisasi, 3) Motivasi anggaran memungkinkan manajemen dapat menetapkan tujuan tertentu yang harus dicapai organisasi; 4) Pengendalian keberadaan anggaran dalam organisasi memungkinkan manajemen untuk melakukan tugas pengendalian yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi.

Perencanaan anggaran merupakan faktor penting dalam pengelolaan anggaran (Kuntadi & Rosdiana, 2022). Perencanaan anggaran memastikan keterhubungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian. Dokumen perencanaan ini memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh dalam bentuk kerangka peraturan dan kerangka anggaran, yang disebut dengan rencana kerja. Menurut Nurkholis dan Khusnaini (2019) perencanaan anggaran adalah suatu

proses dimana suatu rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, disusun kemudian dialokasikan pada setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013) perencanaan sebagai acuan penyusunan anggaran pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk periode waktu tertentu. Guna tercapainya pelatihan tenaga kerja konstruksi yang berkompeten maka diperlukan perencanaan anggaran yang baik agar menghasilkan *output* yang sesuai dengan target sasaran.

2.6 Teori Belanja Negara

Sejak tahun 2005 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, telah dilakukan perubahan format baru belanja negara guna mewujudkan format belanja negara yang lebih transparan dan tidak timpang tindih, dimana tidak membedakan lagi antara pengeluaran rutin dengan pengeluaran pembangunan (Sulaeman et al, 2012). Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembiayaan bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Belanja pemerintah merupakan belanja atau pengeluaran yang diperuntukkan bagi kepentingan umum guna menumbuhkan perekonomian dan memberdayakan masyarakat (Safitri, 2021). Belanja pemerintah adalah seluruh pengeluaran pemerintah yang membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Menurut organisasi, belanja pemerintah adalah belanja yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga (K/L) sesuai dengan program rencana kerja pemerintah. Dalam penelitian ini biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan

pelatihan tenaga kerja konstruksi merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat. Belanja negara dapat dikatakan sebagai nilai pengurang kekayaan negara berdasarkan belanja pemerintah untuk rencana kerja pemerintah yang telah dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan APBN.

Belanja negara merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan-kegiatan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, diperlukan proses penyerapan belanja negara yang dinamis dan terjadwal (Sulaeman et al, 2012). Mengingat fungsi anggaran negara sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 17 tahun 2003 adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi, anggaran negara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Penting untuk diingat bahwa implementasi belanja negara harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal, efisiensi penggunaan dana publik, dan dampak jangka panjang terhadap perekonomian masyarakat.

Manajemen belanja negara berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola belanja dalam hal ini adalah arus kas dan saldo kas jangka pendek untuk menjamin tagihan kepada negara terbayarkan tepat waktu dan tepat jumlah (Sulaeman & Dwinanda, 2021). Manajemen belanja negara merupakan proses pengelolaan dan pengendalian kegiatan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah. Tujuan utama manajemen belanja negara adalah memastikan bahwa penggunaan dana publik untuk belanja negara dilakukan dengan efisien, efektif, dan transparan. Beberapa komponen utama dalam manajemen belanja negara melibatkan

perencanaan, pengadaan, pengeluaran, pengendalian, dan pelaporan keuangan terkait dengan belanja pemerintah. Dalam penelitian ini manajemen belanja negara sangat penting untuk menghindari pemborosan, untuk meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa belanja pemerintah memberikan nilai terbaik untuk masyarakat. Sistem manajemen belanja yang baik akan mendukung penggunaan sumber daya publik secara efektif dan efisien,

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan tentang analisis penerapan standar biaya pelaksanaan pelatihan tenaga kerja konstruksi di Indonesia telah cukup banyak dilakukan sebelumnya. Penulis berusaha memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian penulis, berikut beberapa penelitian yang menjadi referensi penulis.

Jumas, Ariani, & Asrini, A. (2021) melakukan penelitian mengenai Analisis Hubungan Efektifitas Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Terhadap Level Kirkpatrick. Hasil penelitian ini mengungkapkan pelatihan berbasis kompetensi adalah pendidikan yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Kerja Indonesia. Selama periode waktu 2014 sampai dengan 2015, jumlah pelatihan sumber daya manusia jasa konstruksi Sumatera Barat meningkat lebih dari 3 kali lipat, pada tahun 2014 terdapat 5 pelatihan kompetensi dan pada tahun 2015 sebanyak 17 kegiatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi efektivitasnya kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan terutama di Provinsi Sumatera Barat dengan mempertimbangkan 3 aspek tersebut, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal senada juga diungkapkan Sugiri & Pratama (2020) mengenai Aktivitas Pembentukan Biaya Layanan Pembelajaran

Jarak Jauh (PJJ) Sebagai Dampak Pandemi Covid-19, dengan adanya perubahan metode pembelajaran tersebut diikuti dengan perubahan kegiatan dalam pemberian layanan dan anggaran yang diperlukan dalam memberikan layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan aktivitas dalam rangka pencapaian layanan dan satuan biaya itu diperlukan untuk diterapkan.

Selanjutnya penelitian yang membahas tentang pengembangan kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk biaya konsumsi kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Mahfudin (2021), menyatakan bahwa dengan belum adanya pengaturan khusus pada SBM mengenai biaya konsumsi kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat menimbulkan variasi yang tinggi pada alokasi biaya satuan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satuan kerja memandang perlu adanya pengaturan khusus terkait biaya konsumsi diklat. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kusuma, Pambudi, dan Suprayitno (2019) mengenai pengaruh standar biaya keluaran terhadap efisiensi anggaran kementerian negara/lembaga, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa SBKK dan jumlah revisi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi anggaran.

Sulaeman & Adzillah, (2022) melakukan penelitian tentang Efisiensi dan Produktivitas Kinerja Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan produktivitas 24 Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU) di Indonesia. Temuan yang dihasilkan dalam artikel ini adalah tingkat efisiensi rata-rata PTN-BLU di Indonesia berada pada tingkatan tidak efisien. Kemudian Harun, et al., (2020) mengenai pelatihan penyusunan rencana anggaran biaya berdasarkan AHSP sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hasil dari penelitian ini

mengungkapkan di setiap daerah perbaikan infrastruktur semakin banyak dilakukan dengan mengalokasikan dana desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa, perencanaan anggaran merupakan hal yang sangat penting dan harus dikelola agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dengan sasaran biaya, mutu dan waktu yang efektif dan efisien serta bertanggungjawab. Materi yang diberikan kepada perangkat desa yakni: pengenalan tentang RAB dan komponen strukturnya, perhitungan volume pekerjaan, perhitungan perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan, perhitungan jumlah tenaga kerja dan kebutuhan material serta diakhir pelatihan akan diberikan materi berupa penyusunan RAB dan komponennya menggunakan *Microsoft Excel*. Dari hasil pelatihan dapat disimpulkan bahwa, perangkat desa telah memahami bagaimana menyusun RAB berdasarkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) menggunakan *Microsoft Excel*. Luaran dari kegiatan pengabdian kali ini adalah berupa modul anggaran biaya yang dapat digunakan oleh perangkat desa dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan di desanya.

Selanjutnya Kuntadi & Rosdiana (2022) melakukan penelitian mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran belanja pendidikan: Perencanaan anggaran, peraturan, koordinasi (*Literature Review*). Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan sebagai variabel terikat pada perencanaan anggaran, peraturan, dan koordinasi anggaran sebagai variabel bebas dalam tinjauan literatur pengelolaan keuangan negara. Dalam tulisan ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, regulasi dan koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan

anggaran belanja pendidikan. Sedangkan penelitian Sulaeman & Raharjo (2019) mengenai Pembuatan Rencana Anggaran Biaya Bagi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini membahas tentang masih banyaknya instansi terutama BUMDesa yang belum memahami bagaimana membuat rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya sangat penting digunakan terutama untuk penelitian dari penulis mengenai standar biaya pelaksanaan pelatihan tenaga kerja konstruksi. Hasil penelitian ini adalah perlunya kegiatan pendampingan dan pelatihan pembuatan rencana anggaran biaya agar terjadi peningkatan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan.

Sulaeman & Dwinanda (2021) melakukan penelitian mengenai Manajemen Kas Pemerintah: Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Belanja Negara. Penelitian ini membahas tentang pengujian manfaat penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terhadap manajemen kas pemerintah. Hasil dari artikel ini membuktikan bahwa realisasi belanja menggunakan KKP tidak berpengaruh signifikan terhadap kas menganggur dari penggunaan uang persediaan (UP), tetapi realisasi belanja melalui UP tunai berpengaruh. Biaya operasional, jumlah satuan kerja dan ukuran Kementerian Negara/Lembaga berpengaruh signifikan meningkatkan nilai UP KKP. Penelitian senada juga dilakukan Sulaeman et al., (2012) tentang penyerapan anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penyerapan anggaran di Kementerian Keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan belum optimal. Faktor penyebabnya adalah antara lain perencanaan yang tidak

memadai, pelaksanaan yang terlambat dari jadwal, prosedur pelaksanaan yang rumit, dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Destyawan, Handoyo, dan Anisah (2023) mengenai tinjauan kesesuaian implementasi kurikulum terhadap standar kompetensi kerja nasional (SKKNI) menyebutkan bahwa evaluasi kesesuaian kurikulum dengan SKKNI menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa program pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Hasil dari penelitian ini menyatakan kesesuaian implementasi kurikulum terhadap SKKNI dinyatakan cukup sesuai yang mana masing-masing dari data memiliki tingkat kesesuaian diatas 60%. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Nur & Sutarto (2019) mengenai kesesuaian standar kompetensi lulusan (SKL) pada kurikulum 2013 SMK kompetensi keahlian teknik konstruksi batu dan beton (TKBB) dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri jasa konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini menghasilkan kompetensi kebutuhan dunia usaha/dunia industri jasa konstruksi di DIY yang sesuai dengan SKL pada Kurikulum 2013 SMK Kompetensi Keahlian TKBB adalah sebanyak 50 kompetensi, yang dibagi pada 3 mata pelajaran, yaitu konstruksi batu 22 kompetensi, konstruksi beton bertulang 16 kompetensi, dan *finishing* bangunan 12 kompetensi.

Selanjutnya penelitian dari Sandi, Empak, dan Janto (2023) mengenai analisis kesesuaian penerapan prinsip efektif dan efisiensi pengadaan barang dan jasa konstruksi pemerintah di Surabaya menyebutkan tingkat kesesuaian penerapan prinsip efisien dan efektif masing-masing mencapai 87,91% dan 86,31%. Untuk meningkatkan kesesuaian penerapan prinsip efektif dengan cara pemangkasan

waktu proses pengadaan dan pemangkasan biaya administrasi. Sedangkan untuk meningkatkan kesesuaian prinsip efisiensi dengan memperbaiki indikator integrasi program, kualitas sistem, dan minimalisasi jumlah tatap muka pada pelaksanaan sistem tatap muka. Penelitian senada juga dilakukan oleh Purwanto, Hermanto, dan Lindrawati (2023) tentang peningkatan kemampuan administrasi dan akuntansi dalam menghitung biaya kontrak pada konsultan perencana dan pengawas konstruksi di Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah adanya sistem informasi akuntansi untuk menghitung dengan akurat nilai harga pokok setiap proyek sehingga evaluasi kemajuan fisik proyek, evaluasi harga, dan analisis profitabilitas setiap kontrak jasa dapat dilakukan. Sedangkan penelitian dari Putri et al., (2020) mengenai pelatihan manajemen keuangan UMKM konstruksi di Surabaya untuk keberlanjutan kinerja usaha, menyebutkan bahwa permasalahan utama dari keberlangsungan usaha UMKM konstruksi dapat diatasi dengan pelatihan dan *workshop*, tidak hanya dengan model perkuliahan.

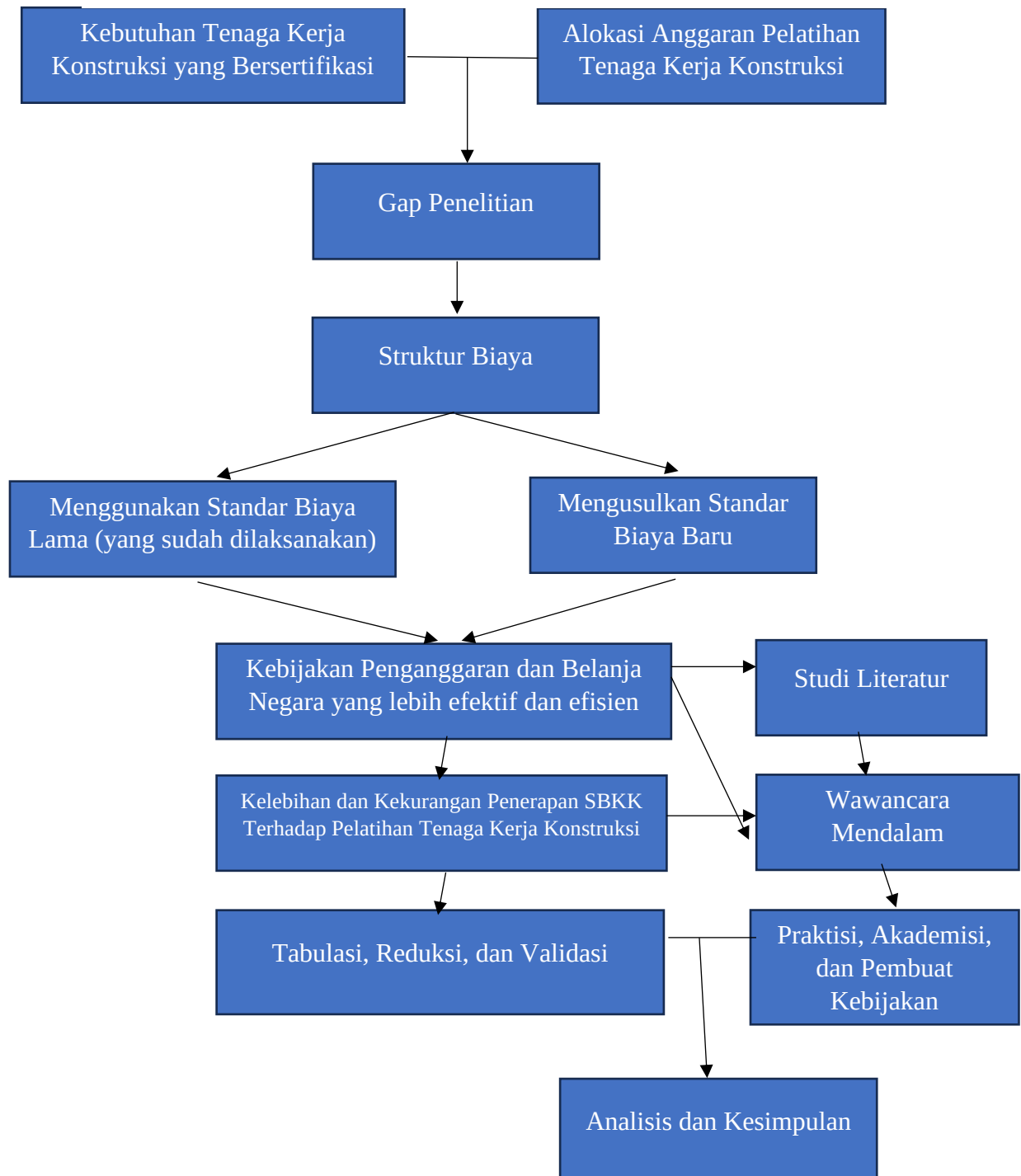
Penelitian dari Wirahadikusumah et al., (2019) tentang tantangan penerapan alokasi anggaran biaya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada kontrak konstruksi proyek berisiko tinggi, menyatakan bahwa komponen biaya yang paling signifikan adalah premi asuransi, perizinan, serta gaji pengawasan K3. Perlu adanya pemisahan perhitungan biaya SMK3 dalam kontrak baik di lingkungan maupun di luar lingkungan Kementerian PUPR.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan alur yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini. Alur dimulai dengan rumusan masalah, dilanjutkan ke tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Kerangka pemikiran penulis gambarkan sebagaimana pada Gambar II.1 berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah penulis, 2023

Kerangka pemikiran yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini sesuai gambar di atas memiliki berbagai tahapan yang dimulai dari adanya analisis situasi dan kondisi terkini objek penelitian. Isu terkini yang terjadi adalah tentang kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Isu selanjutnya adalah adanya keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi sesuai dengan target yang ingin dicapai pemerintah. Dari kedua isu tersebut penulis melakukan analisis terhadap gap penelitian yang berdasarkan dari *literatur review* yang penulis peroleh dari berbagai sumber.

Tahapan selanjutnya adalah penulis melakukan analisis struktur biaya dengan membagi antara menggunakan penganggaran yang sebelumnya telah dilakukan dengan dasar standar biaya masukan dan membagi dengan menggunakan usulan standar biaya baru dengan acuan standar biaya keluaran. Hasil analisis yang ada dilakukan perbandingan dengan kebijakan belanja negara yang efektif dan efisien berdasarkan pada *literatur review* yang penulis peroleh dari berbagai sumber. Kemudian penulis melakukan wawancara mendalam ke berbagai narasumber terkait yang utamanya untuk melihat kelebihan dan kekurangan penerapan standar biaya pada kegiatan pelatihan tenaga kerja konstruksi. Data yang telah terkumpul kemudian penulis lakukan tabulasi, reduksi, dan validasi dari para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk akhirnya dapat dilakukan penarikan kesimpulan mengenai penelitian ini.